

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengelolaan keuangan daerah telah mengalami perubahan yang sangat mendasar sejak diterapkannya otonomi daerah pada tahun 2001. Undang-undang No. 32 tahun 2004 dan Undang-undang No.33 Tahun 2004 yang menjadi landasan utama dalam pelaksanaan otonomi daerah pada hakekatnya memberikan peluang yang lebih besar kepada daerah untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah, baik yang menyangkut sumber daya manusia, dana maupun sumber daya lain yang merupakan kekayaan daerah. Dengan otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan semakin mandiri, mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, baik dalam hal pembiayaan pembangunan maupun dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangannya secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab. Pengelolaan keuangan daerah tersebut dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah (PP 58 tahun 2005, pasal 4).

Kemampuan daerah otonom melaksanakan otonomi keuangan secara penuh dalam periode pendek diragukan, baik sebagai akibat kapabilitas daerah otonom yang tidak dapat berubah begitu cepat maupun sistem keuangan, yaitu pemerintah pusat tidak serta-merta mau kehilangan kendali atas pemerintah daerah. Kuncoro (2004) menjelaskan beberapa hal yang dapat menghambat keberhasilan pemerintah daerah melaksanakan otonomi, yaitu (1) dominannya transfer dan pusat, (2) kurang berperannya perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD), (3) tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan, (4) kendati pajak daerah cukup beragam, ternyata hanya sedikit yang bisa diandalkan sebagai sumber penerimaan, (5) kelemahan dalam pemberian subsidi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Untuk menjamin terselenggarakannya sistem otonomi di daerah dengan baik, maka kosekuensinya adalah diberlakukannya Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Hal ini sangat membuka kesempatan yang luas bagi pemerintah daerah dalam mengurus daerahnya secara mandiri. (Halim, 2004).

Pada lembaran negara Tahun 1956 Nomor 77 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebenarnya pernah diberlakukan yaitu Undang Undang Nomor 32 Tahun 1956, namun pada

kenyataannya tidak begitu berkembang dikarenakan belum siapnya Daerah-daerah mengadakan aparatur sendiri. Suatu daerah dapat dikatakan mandiri, Pertama jika daerah tidak lagi bergantung pada dana bantuan dan intervensi dari pemerintah pusat. Kedua, jika daerah mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan melalui dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut. Berbagai penelitian empiris hingga saat ini masih membuktikan bahwa angka ketergantungan daerah pada pemerintah pusat (khususnya dalam hal pendanaan APBD) masih tinggi.

Disamping itu Pemerintah sangat mengharapkan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah dimekarkan dapat menggali dan mengelola sumber-sumber Pendapatan Asli Daerahnya mampu secara efektif dan efisien. Harapan besar Pemerintah Daerah untuk dapat membangun daerah berdasarkan kemampuan dan kehendak daerah sendiri ternyata dari tahun ketahun dirasakan oleh beberapa daerah otonom jauh dari harapan, malah yang terjadi adalah wujud ketergantungan fiskal dan subsidi serta bantuan Pemerintah Pusat yang merupakan cerminan atas ketidak berdayaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai Belanja Daerah sendiri.

Pengalaman menunjukkan bahwa hampir semua daerah persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif kecil. Umumnya APBD suatu daerah di Indonesia didominasi oleh sumbangan Pemerintah Pusat dan Sumbangan

Lain-lain yang diatur dalam Perundang-undangan. Hal ini menyebabkan daerah sangat tergantung pada Pemerintah Pusat, sehingga kemampuan daerah untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki menjadi sangat terbatas.

Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Rasio kemandirian bertujuan untuk menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal dan menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah (Halim, 2007).

Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan yang dicapai Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. (Mardiasmo, 2013).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Tingkat Kemandirian dan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Kota/Kabupaten Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 – 2016”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Tingkat Kemandirian Pada Pemerintah Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 - 2016?
2. Bagaimana Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 - 2016?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Tingkat Kemandirian Pemerintah Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 – 2016.
2. Untuk menganalisis Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 – 2016.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulis dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Bagi Penulis, untuk memperluas wawasan tentang tingkat kemandirian dan efektivitas pemerintah daerah, serta pengaplikasian ilmu yang di pelajari.
2. Bagi Pemerintah Daerah yang ada di Provinsi Jawa Timur sebagai acuan dalam mengambil suatu kebijakan daerah.
3. Bagi peneliti berikutnya, memberikan sumbangan wawasan dan dapat dijadikan sebagai dasar pembanding/acuan dalam penelitian selanjutnya yang ada keterkaitan dengan objek penelitian.